VETERAN SOCIETY JOURNAL
Volume 5: Number 1: Mei 2024 / E-ISSN 2722-3299 P-ISSN 2722-3302
Published by Faculty Of Law
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional: Pemahaman dan Implementasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Mahasiswa

Nathania Aurell Manabung[1*], Henderina Julia Vindi Putri[2], Florista Dea Avita[3], Nathaniela Gracia Amanda Putri [4], Turshe Pramesta Syah[5], Amirul Fahmi Yusuf[6]

[1] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010186@student.upnjatim.ac.id*
[2] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010228@student.upnjatim.ac.id*
[3] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010225@student.upnjatim.ac.id*
[4] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010184@student.upnjatim.ac.id*
[5] *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010091@student.upnjatim.ac.id*
[6] *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Email: amirulfahmiyusuf@gmail.com*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dan berdampak signifikan terhadap sistem hukum nasional. Alasan signifikansinya terletak pada sifat putusan tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Ini berarti, sekali putusan dikeluarkan, tidak ada lagi pihak yang dapat menentang atau mengubahnya. Putusan ini juga memiliki kekuatan untuk merubah interpretasi dan penerapan undang-undang dalam praktek hukum sehari-hari. Perubahan interpretasi dan penerapan undang-undang ini sangat penting karena dapat membawa perubahan besar dalam praktek hukum. putusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak pada keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Keadilan hukum dapat dipengaruhi oleh interpretasi dan penerapan hukum yang diubah oleh putusan. Sementara itu, kepastian hukum dapat ditingkatkan melalui putusan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam membentuk dan menjaga sistem hukum nasional. Metode pengumpulan data ini menggabungkan antara observasi, sosialisasi, dan arsip atau buku. Diharapkan sosialisasi ini membantu mahasiswa memahami putusan MK dapat mempengaruhi praktik hukum dan kebijakan serta memahami implikasi dan mengawasi proses hukum untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap hukum yang berlaku. Metode sosialisasi ini dilakukan dengan diskusi bersama melalui presentasi dan tanya jawab dengan target sosialisasi adalah Mahasiswa Kelompok 5 PMM 4 UPN "Veteran" Jawa Timur.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Hukum Nasional; Dampak Putusan; Pemilihan Umum

I. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai dampak besar terhadap perkembangan hukum nasional di Indonesia. Sebagai lembaga yang diberi wewenang dengan diberi kewenangan untuk menguji undang-undang berdasarkan UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki pengaruh yang besar dalam memastikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan seluruh produk hukum yang dihasilkan berpegang teguh pada nilai-nilai konstitusi. Namun seringkali Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada permasalahan hukum yang kompleks dan merupakan bagian dari perubahan dinamika politik dan sosial. Keputusan-

*Corresponding Author

keputusan ini mungkin mempunyai dampak yang signifikan tidak hanya terhadap undang-undang dan peraturan yang sedang ditinjau tetapi juga terhadap praktik hukum, kebijakan publik, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh keputusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Artikel ini berfokus pada beberapa keputusan penting yang memiliki implikasi luas, mengeksplorasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi lembaga legislatif dan eksekutif serta lembaga yudikatif, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami fungsi strategis Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan mengkaji dampaknya terhadap kerangka hukum nasional. Sosialisasi mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum nasional berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami bagaimana keputusan MK mempengaruhi praktik hukum dan kebijakan di Indonesia. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa dapat lebih proaktif dalam mengawasi dan mempengaruhi proses hukum, serta meningkatkan pemahaman hukum mereka sendiri. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mempertegas pentingnya peran mahasiswa dalam sistem hukum. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia. Dengan memahami dampak putusan MK, masyarakat dapat lebih mengetahui cara berpartisipasi dalam proses hukum dan mempengaruhi keputusan hukum yang diambil. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk menyampaikan pemahaman mendalam mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum nasional kepada semua pihak yang terkait, Kegiatan sosialisasi ini memberikan edukasi kepada para akademisi mengenai konsekuensi hukum dan administratif dari putusan tersebut.

II. Metodologi

Metodologi penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berpusat kepada data-data, objek permasalahan tertentu dan Studi kasus merupakan sumber yang andal untuk

mendapatkan informasi dan sebagai bahan pembelajaran. Data untuk studi kasus ini diperoleh dari berbagai sumber resmi dan hasil penelitian ini hanya relevan untuk kasus yang sedang dianalisis. Studi kasus bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan deskripsi atau menghasilkan teori. Metode pengumpulan data menggabungkan antara observasi, sosialisasi, dan arsip atau buku. Mitra dari sosialisasi kami adalah Mahasiswa Kelompok 5 PMM 4 UPN "Veteran" Jawa Timur. Sasaran dari analisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sistem hukum nasional adalah mahasiswa. Analisis ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa tentang peran dan fungsi MK dalam sistem hukum nasional, serta implikasi putusan MK terhadap kebijakan dan praktik hukum di Indonesia. Dengan memahami bagaimana putusan MK mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum, mahasiswa dapat lebih aktif dalam mengawasi dan mempengaruhi proses hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum mereka sendiri. Pada sosialisasi ini yang melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah kami Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai narasumber serta pemateri dan Mahasiswa Kelompok 5 PMM 4 UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai target sosialisasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Putusan Beserta Contoh Putusan

Putusan adalah keputusan resmi yang diambil oleh hakim dalam suatu perkara hukum setelah melalui proses persidangan. Putusan berisi penjelasan tentang fakta hukum, penerapan hukum, dan hasil keputusan hakim yang menjadi dasar penyelesaian perkara tersebut. Putusan ini mengikat dan harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam putusan, hakim juga menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusannya. Alasan ini berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak selama proses persidangan. Putusan diambil setelah hakim melakukan pertimbangan yang matang berdasarkan hukum yang berlaku. Setelah putusan dijatuhkan, biasanya diberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum ini dapat berupa banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), grasi, amnesti, atau abolisi. Masing-masing upaya hukum memiliki prosedur, syarat, dan konsekuensi yang berbeda-beda. Secara umum, putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memperoleh

keadilan. Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan tidak selalu memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, upaya hukum menjadi sangat penting sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Berbagai jenis upaya hukum tersebut antara lain 1) Banding: Upaya hukum ini dilakukan untuk membatalkan atau merubah putusan pengadilan tingkat pertama. Biasanya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. 2) Kasasi: Upaya hukum ini diajukan ke Mahkamah Agung dengan tujuan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Hanya bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat kedua atau banding. 3) Peninjauan Kembali (PK): Upaya hukum ini merupakan upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung dengan tujuan membatalkan putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Biasanya diajukan apabila ditemukan bukti baru yang dapat mengubah putusan. 4) Grasi: Upaya hukum ini diajukan kepada Presiden dengan harapan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dibatalkan atau diubah. Biasanya diajukan oleh terpidana yang telah kehabisan upaya hukum lainnya. 5) Amnesti: Merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden atas suatu tindak pidana. Biasanya diberikan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional. 6) Abolisi: Merupakan penghapusan suatu tindak pidana oleh Presiden. Biasanya dilakukan dalam rangka reformasi hukum atau penyelesaian isu-isu politik tertentu.

Dalam mengambil putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjalani serangkaian proses yang ketat dan teliti. Pertama, mereka melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan. Ini melibatkan penelitian hukum, pengumpulan dan analisis bukti, serta mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa. Setelah itu, hakim MK melakukan deliberasi atau musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah ini, setiap hakim memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan analisisnya terhadap kasus. Proses ini dilakukan hingga semua hakim mencapai kesepakatan atau setidaknya mayoritas. Putusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan hukum yang matang dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya. Hakim MK juga harus menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, yang dikenal dengan 'pertimbangan

hukum' atau '*ratio decidendi*'. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Selain itu, putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, proses pengambilan putusan oleh hakim MK sangat penting dalam menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki implikasi yang luas dan jauh melampaui kasus individu yang sedang dipertimbangkan. Putusan tersebut dapat menjadi presiden yang berpengaruh dalam interpretasi dan penerapan hukum di masa depan. Oleh karena itu, hakim MK juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan mereka.

A. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mengarah pada perubahan signifikan dalam undang-undang atau kebijakan publik. Misalnya, jika MK menemukan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, hal ini dapat memicu proses legislatif untuk mengubah atau mencabut undang-undang tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Misalnya, putusan yang memperluas atau membatasi hak-hak konstitusional dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari warga negara. Oleh karena itu, dalam mengambil putusan, hakim MK perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak yang mungkin timbul. Secara keseluruhan, pengambilan putusan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi adalah proses yang sangat penting dan kompleks. Proses ini melibatkan penelitian hukum yang mendalam, analisis bukti dan argumen, serta pertimbangan tentang dampak jangka panjang dari putusan tersebut. Seluruh proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adil, transparan, dan memenuhi standar hukum yang tertinggi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa jenis putusan, antara lain:

a. Putusan mengenai pengujian undang-undang: Putusan ini dikeluarkan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Putusan mengenai pengujian undang-undang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Proses ini

melibatkan pemeriksaan undang-undang dalam kaitannya dengan konstitusi dan penilaian apakah undang-undang tersebut memenuhi standar dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi. Jika dianggap bertentangan, undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Setelah putusan ini dikeluarkan, undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dapat dicabut atau direvisi. Dalam beberapa kasus, putusan ini dapat memicu perubahan signifikan dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Putusan pengujian undang-undang bukan hanya melibatkan interpretasi konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan implikasi praktis dan dampak sosial dari undang-undang tersebut. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa undang-undang tidak hanya sesuai dengan konstitusi, tetapi juga adil dan dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat. Selain itu, putusan pengujian undang-undang juga bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Hal ini sangat penting dalam upaya mempertahankan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, putusan mengenai pengujian undang-undang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan publik di suatu negara selaras dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Putusan sengketa kewenangan adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan tentang siapa yang berhak dan bertanggung jawab dalam suatu kasus hukum. Ini biasanya terjadi ketika ada lebih dari satu entitas atau lembaga yang mengklaim memiliki kewenangan atas suatu kasus, dan memerlukan keputusan hukum untuk menentukan kewenangan yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan sengketa kewenangan yang timbul antara lembaga-lembaga negara, seperti antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, serta antara Presiden dan DPR, BPK. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 tidak hanya terbatas pada kewenangan yang secara eksplisit dinyatakan, Namun, juga mencakup wewenang implisit yang terkandung dalam wewenang utama serta

wewenang yang diperlukan untuk menjalankan wewenang utama tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dapat ditafsirkan tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga melalui interpretasi yang lebih luas dan kontekstual. Dalam beberapa putusan lainnya, Mahkamah Konstitusi telah menolak sengketa kewenangan yang diajukan oleh Pemohon, seperti dalam Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 Presiden vs DPR, BPK, di mana Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya sengketa kewenangan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam konteks hukum, Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara memiliki implikasi yang signifikan dalam menjaga kestabilan dan keamanan politik di Indonesia. Dengan menyelesaikan sengketa kewenangan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi dan menjaga kepentingan negara, serta memastikan bahwa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Putusan sengketa hasil pemilu: Perselisihan hasil pemilu, yang disebut juga Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Badan yang berwenang menguji dan memutus PHPU adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK dapat mengeluarkan berbagai jenis putusan terkait dengan PHPU, antara lain putusan, putusan sela, atau ketetapan. Contoh ragam putusan MK tentang PHPU meliputi: 1). Putusan: MK dapat mengeluarkan putusan yang memutuskan tentang keberatan atau tidak berwenang mengadili suatu perkara PHPU. Contoh, MK dapat memutuskan bahwa suatu permohonan PHPU tidak diterima atau ditolak. 2). Putusan Sela: MK dapat mengeluarkan putusan sela yang berisi petunjuk kepada tergugat dan/atau pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun sehubungan dengan pokok sengketa. Apabila Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sela, Mahkamah Konstitusi dalam sidang dapat mendengarkan laporan tentang dasar dikeluarkannya putusan dan pelaksanaan hasil putusan sela tersebut sebagai bahan pertimbangan. 3). Ketetapan: MK dapat mengeluarkan ketetapan yang berupa penolakan suatu permohonan PHPU, penarikan kembali suatu permohonan, atau tidak hadirnya pihak yang berwenang pada sidang pertama

pemeriksaan pendahuluan. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikabulkan sebagian dapat ditemukan dalam Putusan MK No. 73/PHPU.C-VII/2019. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan membatalkan keputusan KPU tentang PHPU untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait daerah pemilihan (dapil) 6 Kabupaten Aceh Utara untuk Partai Persatuan Daerah (PPD) serta dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2 untuk PPD. MK menyatakan bahwa jumlah suara yang sah untuk PPD di dapil 6 Kabupaten Aceh Utara adalah 1.876 suara dan di dapil Tapanuli Selatan 2 adalah 720 suara, sementara menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.[1] Sebaliknya, dalam sengketa hasil Pemilu 2024, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang meminta pembatalan keputusan KPU terkait hasil pemilu dan penyelenggaraan pemilu ulang. [2]

d. Putusan sengketa partai politik: Putusan sengketa partai politik adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik. Dalam konteks Indonesia, sengketa partai politik dapat diangkat ke pengadilan jika tidak dapat diselesaikan melalui proses internal partai. Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan partai dan dapat mempengaruhi keputusan politik di tingkat nasional dan lokal. Dalam beberapa kasus, sengketa partai politik dapat berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak dapat diselesaikan melalui proses internal partai. Contohnya, kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang masih berlanjut perseteruannya, membuktikan betapa berlarut-larutnya penanganan sengketa kepengurusan parpol hingga berujung ke PTUN. Namun, dalam beberapa kasus, putusan sengketa partai politik tidak hanya terkait dengan sengketa internal partai, tetapi juga dengan proses pemerintahan dan politik. Misalnya, putusan PN sebagai putusan pertama dan terakhir tidak hanya menghilangkan upaya hukum luar biasa, tetapi juga dapat berdampak pada

[1] Meidiana. D. (2024). Guru Besar FH UMJ Tanggapi Putusan MK Tentang Sengketa Pemilu 2024
[2] JDIH. Ragam Putusan MK Tentang Sengketa Hasil Pemilu

parlemen, karena anggota dewan yang terlibat dalam sengketa dapat dipengaruhi oleh putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, putusan sengketa partai politik juga dapat diangkat ke Mahkamah Partai, yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa partai politik. Contohnya, dalam kasus sengketa kepengurusan Partai Demokrat, sengketa tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebelum diteruskan ke Pengadilan Negeri.[3] Dalam beberapa kasus, putusan sengketa partai politik juga dapat berupa putusan yang final dan mengikat, seperti putusan yang diberikan oleh Mahkamah Partai, yang tidak dapat diuji banding atau kasasi. Contohnya, dalam kasus sengketa kepengurusan Partai Golkar, putusan PN yang mengikat tidak dapat diuji banding atau kasasi. Dalam beberapa kasus, putusan sengketa partai politik juga dapat berupa putusan yang membagi kategori partai politik menjadi tiga, seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Putusan ini dikeluarkan ketika ada sengketa internal dalam partai politik yang berdampak pada struktur dan kepemimpinan partai.

e. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang: Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah proses hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengevaluasi apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan undang-undang (UU) sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak mengganggu kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD.[4] Dalam putusan pengujian, MK memeriksa apakah peraturan perundang-undangan yang diberlakukan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUD, termasuk syarat-syarat yang terkait dengan kewenangan lembaga negara, hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Jika peraturan perundang-undangan ditemukan tidak sesuai dengan UUD, MK dapat menghapus atau memodifikasi peraturan tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi. Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-

[3] Direktori Putusan MA No. 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.
[4] Putusan MK No. 81/PUU-XXI/2023

undang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan parlemen sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak mengganggu kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD. Dengan demikian, putusan pengujian ini memainkan peran penting dalam mempertahankan kestabilan dan keamanan hukum di Indonesia. Putusan ini dikeluarkan ketika ada pengujian terhadap peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.[5] Setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

IV. Sistem Hukum Nasional di Indonesia Saat Ini

Sistem hukum merupakan suatu konsep dimana negara tersebut berusaha untuk menjalankan konstitusinya sehingga melibatkan lembaga lain seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif serta warga negaranya untuk mencapai suatu tujuan.[6] Pada dasarnya, sistem hukum nasional di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang berakar dari sistem hukum Eropa Kontinental atau sering disebut sistem hukum Civil Law. Sistem hukum ini diadopsi dari era penjajahan Belanda dan dipengaruhi juga oleh beberapa sistem hukum lain seperti adat dan agama.

Sistem hukum di Indonesia terdiri dari berbagai jenis hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum konstitusional, dan hukum internasional. Hukum pidana mencakup hukum yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Hukum perdata mencakup hukum yang mengatur hubungan antara individu, seperti hukum kontrak atau hukum properti. Hukum administrasi mencakup hukum yang mengatur operasi pemerintah dan interaksi antara pemerintah dan warganya. Hukum konstitusional mencakup hukum yang mengatur struktur dan fungsi pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum internasional mencakup hukum yang mengatur hubungan suatu negara dengan negara

[5] Aziz. M. (2023). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
[6] Maulana, A. (2018). Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum

lain. Hukum di Indonesia ditegakkan oleh sejumlah institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Kejaksaan bertanggung jawab untuk penuntutan tindak pidana. Pengadilan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman pada mereka yang melanggar hukum.

Indonesia juga mengakui pentingnya hukum adat dan hukum islam dalam sistem hukumnya. Hukum adat adalah hukum yang berada dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakatnya sesuai kebiasaan yang dilakukan. Hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, dan nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Indonesia.[7] Pada dasarnya Hukum adat tumbuh dan berkembang dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mempengaruhi hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan yurisprudensi dapat menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum islam yang berkarakter 'tidak tertulis' dapat mengisi legal pendekatan perbandingan serta pendekatan sejarah melalui nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum islam di Indonesia. Keberlakuan Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal-hal seperti perkawinan dan warisan. Namun, sistem hukum di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya akses keadilan bagi sebagian besar penduduk. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia terus berusaha untuk mereformasi sistem hukum dan memperkuat penegakan hukum. Hukum adat disini menjadi sumber hukum yang penting, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah dan sumber daya alam di banyak wilayah di Indonesia. Hukum agama, khususnya hukum Islam, juga memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia.

Meski demikian, tantangan di bidang hukum di Indonesia masih sangat besar. Korupsi masih menjadi masalah utama dalam sistem hukum di Indonesia. Banyak kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi dan politisi, yang seringkali sulit dituntut karena berbagai alasan. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya akses keadilan bagi sebagian besar penduduk juga menjadi tantangan utama dalam sistem hukum di

[7] Gramedia. (n.d.). Pengertian Hukum Nasional

Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan masyarakat sipil di Indonesia terus berusaha untuk mereformasi sistem hukum dan memperkuat penegakan hukum. Berbagai upaya reformasi hukum telah dilakukan, termasuk perbaikan infrastruktur hukum, peningkatan kapasitas aparatur hukum, dan pembaruan hukum. Meski demikian, perubahan yang signifikan membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga hak asasi manusia. Ini mencakup upaya untuk menjamin bahwa keadilan dan perlindungan hukum diberikan kepada setiap warga negara dengan akses yang sama. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di semua sektor pemerintahan. Dalam konteks internasional, Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai kerjasama hukum internasional dan regional. Ini termasuk kerjasama dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, serta perlindungan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, sistem hukum di Indonesia adalah campuran dari berbagai tradisi hukum. Meski menghadapi sejumlah tantangan, Indonesia terus berusaha untuk mereformasi dan memperkuat sistem hukumnya, demi menciptakan negara hukum yang adil dan beradab. Sistem hukum Indonesia juga didasari oleh nilai-nilai yang ditemukan dalam Pancasila, yaitu lima prinsip dasar yang menjadi pondasi negara.[8] Prinsip-prinsip ini mencakup pengakuan atas satu Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di negara ini. Khususnya, prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, mengedepankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, serta memperkuat hukum dan sistem peradilan untuk melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara. Prinsip ini juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang seimbang dan merata bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis, budaya, agama, atau status sosial ekonomi.

[8] Trijono, R. (2020). Sistem Hukum Nasional: Teori dan Praktik

Adapun prinsip kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, menunjukkan komitmen negara untuk memastikan distribusi yang adil dari hasil pembangunan dan kemakmuran bagi seluruh warga negara. Ini mencakup upaya untuk menghapus ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dalam konteks hukum, prinsip ini mendorong pemerintah untuk membuat dan menerapkan hukum yang mendorong keadilan sosial dan meredakan ketimpangan. Pada akhirnya, sistem hukum di Indonesia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap individu dihormati dan dilindungi oleh hukum.[9] Walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk korupsi dan penegakan hukum yang lemah, negara ini terus berusaha untuk memperbaiki dan memperkuat sistem hukumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem hukum nasional di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan yang signifikan, seperti dalam hal pengembangan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pihak yang terlibat terus berupaya untuk mereformasi sistem hukum dan memperkuat penegakan hukum, dengan harapan mencapai tujuan negara hukum yang adil dan beradab.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan dan mendalam terhadap sistem hukum nasional. Hal ini terutama karena putusan MK dapat mengubah interpretasi dan penerapan hukum yang ada. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi cara seseorang, organisasi, atau bahkan pemerintah memahami dan menerapkan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi kebijakan legislatif dan eksekutif di masa depan. Dalam konteks ini, putusan MK dapat membentuk arah kebijakan hukum dan konstitusional di Indonesia, mengarahkan bagaimana undang-undang dan kebijakan dirancang dan diimplementasikan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan undang-undang hingga pengambilan keputusan eksekutif.

[9] Kurniawan, A. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional

Secara umum, putusan MK berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan di Indonesia selaras dengan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warganya. Ini berarti bahwa putusan MK berperan dalam memastikan bahwa setiap undang-undang atau kebijakan yang diterapkan di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi. Lebih lanjut, putusan MK juga berfungsi sebagai acuan dalam penyelesaian kasus hukum di masa mendatang. Dalam konteks ini, putusan MK memiliki peran penting dalam pembentukan yurisprudensi. Yurisprudensi sendiri adalah kumpulan putusan hukum yang menjadi acuan dan petunjuk bagi hakim dalam menyelesaikan kasus serupa di masa mendatang.

Yurisprudensi adalah bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan panduan dan kerangka kerja bagi hakim dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya mempengaruhi hukum dan kebijakan saat ini, tetapi juga membentuk panduan hukum untuk masa depan. Dengan ini, putusan MK berkontribusi dalam pembentukan dan perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, putusan MK juga berdampak pada proses pembuatan hukum itu sendiri. Dalam banyak kasus, putusan MK telah mendorong perubahan pada undang-undang yang ada atau bahkan mendorong pembuatan undang-undang baru. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya mempengaruhi penerapan hukum, tetapi juga pembentukannya.

Putusan MK juga mempengaruhi cara individu dan organisasi berinteraksi dengan hukum. Dengan mempengaruhi interpretasi hukum, putusan MK dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi dalam berbagai situasi hukum. Ini mencakup bagaimana mereka memahami hak dan kewajiban mereka, bagaimana mereka berinteraksi dengan pemerintah dan institusi hukum lainnya, dan bagaimana mereka menyelesaikan sengketa. Dampak putusan MK pada sistem hukum nasional sangat luas dan mendalam. Dari interpretasi dan penerapan hukum, pembuatan kebijakan, perlindungan hak konstitusional warga, hingga pembentukan yurisprudensi, semua aspek ini dipengaruhi oleh putusan MK. Itulah mengapa putusan MK sangat penting dan memiliki peran krusial dalam sistem hukum Indonesia.

A. Dampak Positif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Nasional di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memiliki dampak positif yang signifikan terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah putusan MK mengenai pengujian Undang-undang oleh masyarakat secara langsung. Putusan ini telah membawa perubahan yang substansial dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam proses legislatif. Sebelum putusan ini, partisipasi masyarakat dalam proses legislatif cukup terbatas. Namun, dengan putusan ini, MK telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang. Hal ini telah membuat proses pembuatan hukum menjadi lebih inklusif dan demokratis, memungkinkan suara-suara dari berbagai lapisan masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan undang-undang. Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah mengeluarkan beberapa putusan yang kontroversial dan sensitif, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, dengan syarat mereka telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan ini memiliki berbagai dampak dalam beberapa aspek.[10]

Putusan MK juga telah membawa perubahan dalam cara pemerintah dan lembaga hukum lainnya beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Putusan ini mengharuskan pemerintah dan lembaga hukum untuk lebih terbuka dan transparan dalam operasional mereka, dan untuk lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat. Ini telah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, dan pada gilirannya, membantu memperkuat demokrasi dan keadilan di Indonesia. Jadi, putusan MK memiliki dampak yang sangat positif dan berarti bagi sistem hukum nasional di Indonesia. Tetapi penting juga untuk diingat bahwa perubahan ini tidak terjadi seketika; itu membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Tapi, dengan setiap langkah kecil yang diambil, kita semakin dekat ke sistem hukum yang lebih adil dan demokratis.

B. Dampak Negatif Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Nasional di Indonesia

[10] Mustopa, A. A. S. A. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia (hal. 5-7).

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki potensi untuk memberikan dampak negatif terhadap hukum nasional di Indonesia. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memastikan konstitusionalitas undang-undang dan menjaga tegaknya hukum, putusan tersebut bisa berakibat buruk jika tidak konsisten atau tidak sejalan dengan putusan sebelumnya. Ketidakpastian hukum bisa tercipta dari putusan MK yang tidak konsisten. Hal ini bisa terjadi jika ada perbedaan signifikan antara putusannya dan putusan sebelumnya tanpa adanya alasan yang cukup kuat atau penjelasan yang jelas. Ketidakpastian ini bisa membuat sulit bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum untuk memahami dan menerapkan hukum dengan benar.

Putusan MK juga dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan. Ini bisa terjadi jika putusan MK memberikan lebih banyak kekuasaan kepada satu cabang pemerintahan dibandingkan dengan yang lain, atau jika putusan tersebut mengurangi kekuasaan dari satu cabang pemerintahan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga sistem check and balance dalam pemerintahan, dan jika terganggu, bisa mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Putusan MK dapat menciptakan preseden hukum yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Preseden hukum adalah putusan pengadilan sebelumnya yang menjadi acuan bagi putusan pengadilan selanjutnya. Jika acuan yang dibuat oleh MK disalahgunakan, hal ini bisa berpotensi merusak integritas sistem hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi MK untuk membuat putusan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang, mengingat dampak yang bisa ditimbulkannya terhadap hukum nasional di Indonesia.

C. Penerapan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hukum Nasional di Indonesia

Putusan MK ini menimbulkan kegalauan dan kontroversi di masyarakat, terutama terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan kepentingan anak Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang hendak maju sebagai calon wakil presiden.[11] Kedua, putusan ini dapat mempengaruhi independensi hakim konstitusi, karena beberapa orang

[11] University of Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). Terkait putusan MK soal batas usia capres cawapres, ini pandangan pakar UMY. Diakses pada 20 Mei 2024

berpandangan bahwa putusan ini beraroma politis dan terkait dengan kepentingan pribadi. Ketiga, putusan ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum di Indonesia, karena beberapa orang berpandangan bahwa putusan ini tidak memberikan alasan hukum yang rasional dan logis.

Dalam beberapa tahun terakhir, MK telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pengawasannya. Sebelum adanya Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, sistem pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia dilakukan oleh Komisi Yudisial.[12] Namun, setelah putusan tersebut, sistem pengawasan tersebut berubah dan hanya dilakukan oleh lembaga pengawas internal dari MK. Dampak dari perubahan ini adalah kekosongan hukum yang timbul, mengenai dasar yuridis Komisi Yudisial untuk melaksanakan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, MK memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat, turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum.[13] Namun, problem dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi hal seperti pembuatan peraturan perundang-undangan yang kurang efektif dan masyarakat pencari kemenangan yang kurang memahami hukum.

Pada intinya, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum nasional di Indonesia. Dampak ini dapat dilihat dalam beberapa aspek, termasuk kegalauan dan kontroversi di masyarakat, mempengaruhi independensi hakim konstitusi, dan mempengaruhi pelaksanaan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan perbaikan dalam sistem pengawasan MK serta penegakan hukum di Indonesia agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan keadilan dapat dijamin.

Contoh Putusan dan Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional

Konstitusi adalah hukum tertinggi di Indonesia dan memasukkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia ke dalam sistem hukum negara. Oleh karena itu, karena

[12] Sanyoto. (n.d.). Penegakan Hukum di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
[13] Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam. (2014). Putusan Ultra Petita. Mahkamah Konstitusi.

semua undang-undang berada di ranah publik, maka undang-undang tersebut harus berdasarkan pada Konstitusi, baik undang-undang tertulis maupun tidak tertulis yang disahkan oleh Konstitusi. Contoh kejanggalan ini adalah sistem Noken yang tidak diatur dalam undang-undang namun digunakan pada beberapa pemilu dan pemilukada di Papua. Noken diakui oleh konstitusi sebagai bagian dari sistem pemilu nasional dengan persyaratan tertentu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47-8V/PHPU-A-VI/2009, MK mengakui sistem pemilu Noken merupakan cara memilih masyarakat di sebagian wilayah Papua. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada, sejalan dengan perkembangan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. MK menekankan pentingnya menghormati budaya masyarakat adat Papua yang menggunakan sistem noken dalam pemilu.

Sistem noken yang persetujuannya diwakili oleh kepala suku adat, berbeda dengan asas pemilu ruba (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdi (jujur dan adil) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Institusi-institusi di kawasan ini mengkhawatirkan dan berpotensi rawan konflik. Sistem Noken mencerminkan kearifan lokal dan harus dihormati serta dilindungi dalam kerangka hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan gabungan peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945. Sistem hukum suatu negara mencakup struktur, budaya, isi, dan semua elemen yang saling terkait. Dalam perkembangannya, sistem hukum negara harus tetap berpedoman pada landasan hukum substantif yang mencerminkan semangat Pancasila, nilai-nilai, norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan toleransi.Semangat Indonesia tersebut tercermin dalam Pasal 24F yang menyatakan bahwa negara menata diri untuk mengembangkan sistem hukum nasional dengan menjaga dan menghormati keanekaragaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum nasional harus didasarkan pada pedoman yang melandasi hukum nasional dari kebijakan hukum yang ada, sistem hukum yang dianut, landasan filosofis pembentukan undang-undang dan asas-asas umum yang berlaku.

Perkembangan sistem hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat perlu diarahkan agar sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat tersebut. Sistem hukum Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Segala peraturan perundang-undangan dalam negeri harus berpedoman pada UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ciri menonjol dari tiap daerah memerlukan penanganan yang beda antara daerah satu dengan daerah lain tergantung dari hal-hal yang dibutuhkan dan harus dipantau keadaanya dan diatasi oleh sistem hukum nasional yang dijalankan oleh Indonesia. Pembangunan dan pembenahan sistem hukum nasional dijadikan harapan agar dapat mencakup seluruh isi dari suatu masyarakat yang tentunya berbeda golongan, suku, ras, dan agama sebagai wujud pluralisme dalam sistem negara kesatuan NKRI, dan diharapkan dapat mencakup seluruh golongan, suku, ras, dan agama. Diharapkan terbangun sistem hukum yang lebih baik dalam kerangka Ika. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada di beberapa daerah di Indonesia, Noken perlu diakui sebagai bagian dari sistem hukum negara. Meskipun noken adalah hukum yang tidak tidak tertulis atau tidak dicantumkan, namun keberadaan Noken sudah lama diterima dan diamalkan oleh beberapa masyarakat yang berada di wilayah daerah dengan geografi pegunungan Papua. Negara wajib mengakui kesatuan masyarakat adat, budaya, dan tata cara yang ada di dalamnya, namun penyelenggaraan pemilihan umum secara Noken harus mematuhi Undang-Undang dan Peraturan tentang Undangan Pemilihan.Pertimbangan pengambilan keputusan merupakan kearifan lokal yang perlu dilindungi dan dilestarikan dalam sistem hukum suatu negara.

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan dengan bagian-bagian yang saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian hukum nasional terdiri dari aturan perundang-undangan yang dibentuk dan dijalankan guna bertujuan mencapai cita-cita hukum negara. Sistem hukum nasional Indonesia berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mencakup struktur, budaya, isi, peraturan hukum dan semua unsur yang terkait. Sistem hukum dirancang untuk berfungsi dengan baik jika tidak ada tumpang tindih di antara sistem tersebut dan jika sistem tersebut didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sesuai. Sistem hukum mengatur seluruh aktivitas kehidupan manusia mulai dari konsepsi hingga kelahiran dan kehidupan.

Pembangunan sistem hukum nasional Indonesia harus berpedoman pada sumber hukum substantif yang menggambarkan semangat yang ada pada Indonesia. Sumber hukum penting tersebut antara lain Pancasila, cita-cita, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat Indonesia, kekeluargaan, perhatian, gotong royong, toleransi, dan ciri-ciri lain yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini harus menjadi yang terdepan dalam membangun undang-undang nasional di masa depan. Semangat Indonesia tersebut telah tercermin di Pasal 24F yang menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan menjaga dan menghormati keanekaragaman nilai-nilai dan sumber-sumber hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada kebijakan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, landasan filosofis pembentukan undang-undang, dan pedoman yang mendasari hukum nasional mengenai asas-asas umum yang berlaku. Perkembangan sistem hukum Indonesia yang didorong oleh dinamika kehidupan masyarakat harus diarahkan pada pengembangan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Semua regulasi nasional harus berakar pada dan terinspirasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi Indonesia di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang unik, pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal harus dipertimbangkan dan disesuaikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengembangan sistem hukum nasional diharapkan dapat menyatukan semua kelompok, suku, ras, dan agama sebagai bentuk pluralisme dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi ini diharapkan mampu membentuk sistem hukum yang lebih efektif dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu contoh pengakuan terhadap kearifan lokal dalam sistem hukum nasional adalah Noken, sebuah metode pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum di beberapa wilayah Papua. Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan memvalidasi Noken karena sesuai dengan prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, dan terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Noken diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pelaksanaan pemilihan umum di beberapa wilayah

Indonesia, meskipun tidak secara tertulis, karena telah lama diakui dan diterapkan oleh masyarakat di wilayah Papua dengan kondisi geografis yang khas.

Negara harus mengakui kesatuan masyarakat adat, kebudayaan, dan tradisi yang melekat padanya, tetapi implementasi pemilihan umum dengan menggunakan Noken harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Musyawarah dalam menentukan pilihan merupakan nilai lokal yang harus dijaga dan diwariskan dalam sistem hukum nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Noken di Papua memiliki dampak signifikan dalam konteks hukum nasional, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak masyarakat adat, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Pertama, keputusan MK ini dapat menyediakan dasar hukum yang lebih kuat untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Noken merupakan bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakat Papua, dan pengakuan MK terhadap hak-hak terkait Noken dapat menjadi langkah awal untuk pengakuan yang lebih luas terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat di seluruh Indonesia. Ini bisa mengarah pada peningkatan upaya perlindungan terhadap keberagaman budaya dan hak-hak tradisional masyarakat adat di negara ini.

Kedua, keputusan MK juga bisa mempengaruhi kerangka regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua. Noken sering dikaitkan dengan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdasarkan nilai-nilai keberlanjutan serta keseimbangan ekologi. Dengan mengakui hak-hak terkait Noken, keputusan MK bisa mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Papua.

Selain itu, putusan MK ini juga bisa memicu diskusi lebih lanjut tentang batas-batas otonomi daerah dan wewenang pemerintah pusat. Pengakuan terhadap Noken sebagai bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Papua dapat membawa implikasi terhadap bagaimana kebijakan otonomi daerah diterapkan di Papua, termasuk kewenangan lokal dalam pengambilan keputusan terkait budaya, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, putusan MK mengenai Noken di Papua dapat menjadi titik awal penting dalam upaya menuju pengakuan yang lebih luas

terhadap hak-hak masyarakat adat dan peningkatan otonomi daerah di Papua. Namun, dampaknya akan sangat tergantung pada bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan dan diinterpretasikan oleh pemerintah serta lembaga terkait lainnya.

Hasil dan Rincian Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi yang kami adakan dengan tema Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional yang dihadiri oleh Mahasiswa Kelompok 5 PMM 4 UPN "Veteran" Jawa Timur sebagai audiens memberikan dampak dan hasil yang cukup baik. Materi yang kami sampaikan cukup dapat dipahami oleh audiens, terbukti dari beberapa pertanyaan yang kami lontarkan kepada audiens dapat mereka jawab dengan baik. Audiens juga berpartisipasi cukup aktif pada saat kami memberikan materi dan membuka sesi tanya jawab.

Gambar 1. Pemberian Hadiah Kepada Pemenang Kuis, 2024.

Sosialisasi ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian mahasiswa terhadap peran dan fungsi MK dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini membantu mahasiswa memahami bagaimana putusan MK mempengaruhi kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, serta implikasi putusan MK terhadap kehidupan sehari-hari.

Gambar 2. Dokumentasi Panitia Bersama Peserta Sosialisasi, 2024.

IV. Kesimpulan

Putusan pengadilan adalah keputusan resmi yang dibuat oleh hakim setelah melalui proses persidangan. Putusan tersebut berisi penjelasan mengenai fakta hukum, penerapan hukum, dan hasil keputusan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Hakim merumuskan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan. Pihak yang merasa dirugikan oleh putusan dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak besar pada sistem hukum nasional karena dapat mengubah interpretasi dan penerapan hukum, serta mempengaruhi kebijakan legislatif dan eksekutif di masa depan. Putusan MK memastikan hukum dan kebijakan di Indonesia selaras dengan konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Putusan ini juga membentuk yurisprudensi sebagai acuan dalam penyelesaian kasus hukum di masa mendatang. Sistem hukum Indonesia berakar dari sistem hukum Eropa Kontinental, dengan pengaruh hukum adat dan agama. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang melandasi semua peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, sistem Noken dalam pemilu di Papua, yang diakui oleh MK sebagai bagian dari sistem pemilu nasional berdasarkan pengakuan terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sesuai Pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

Referensi

Aziz. M. (2023). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Direktori Putusan MA No. 43/Pdt.G/2017/PN.Sit.

Gramedia. (n.d.). Pengertian Hukum Nasional

JDIH. Ragam Putusan MK Tentang Sengketa Hasil Pemilu

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Vol. 8, No. 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kurniawan, A. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional

Maulana, A. (2018). Sistem Hukum dan Klasifikasi Hukum

Meidiana. D. (2024). Guru Besar FH UMJ Tanggapi Putusan MK Tentang Sengketa Pemilu 2024

Mustopa, A. A. S. A. (2022). Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia (hal. 5-7).

Persada.Jayus.(2020). | Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup- XVI/2018). IDJ, Volume 01, Issue 2 (2021).

Putusan MK No. 81/PUU-XXI/2023

Rubaie, A., Nurjaya, N., Ridwan, M., & Istislam. (2014). Putusan Ultra Petita. Mahkamah Konstitusi.

Sanyoto. (n.d.). Penegakan Hukum di Indonesia. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Trijono, R. (2020). Sistem Hukum Nasional: Teori dan Praktik

University of Muhammadiyah Yogyakarta. (n.d.). Terkait putusan MK soal batas usia capres cawapres, ini pandangan pakar UMY. Diakses pada 20 Mei 2024, dari https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy

Zazili. (2012). Pengakuan Negara terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009). Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1.